



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI SUTRISNO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **802974**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1037 m2/500 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1924 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 1045 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 241.000.000

1. MOBIL, FORD VIESTA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 675.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.345.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.211.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.211.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.